

## ABSTRAK

### SUATU TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TENTANG PELAKSANAAN PENGURUSAN IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT PERMATA BUNDA DI DINAS KESEHATAN PEMERINTAH KOTA MEDAN

OLEH

Zizi Fauziah

NPM : 98 840 0043

BIDANG HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Rumah sakit sebagai salah satu sarana pelayanan kesehatan memberikan arti bahwa rumah sakit harus dapat mempertanggung jawabkan aktivitas-aktivitas yang ada di dalamnya. Menilik fungsi dan keberadaan rumah sakit tersebut maka perlu diadakan pengaturan yang spesifik terhadap rumah sakit itu sendiri khususnya dalam pelaksanaan pemberian izin operasional. Pemberian izin meliputi ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi sehingga rumah sakit tersebut dapat menjalankan aktivitasnya. Pelaksanaan pemberian izin bagi rumah sakit menjadi sangat penting karena hidang pelayanan yang diberikan rumah sakit menyangkut nyawa seseorang. Sedangkan disatu sisi pelaksanaan izin adalah pelaksanaan fungsi-fungsi oleh aparatur pemerintahan yang berwenang mengurus izin rumah sakit itu sendiri, sehingga dalam kesempatan ini maka spesifik jurusan yang akan memilikinya adalah jurusan Hukum Administrasi Negara

Dalam penelitian ini diajukan rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimanakah syarat dan prosedur pendirian sebuah rumah sakit, apakah telah memenuhi kepentingan masyarakat banyak.
2. Apakah fungsi rumah sakit dalam pelayanan kesehatan masyarakat telah memenuhi harapan masyarakat itu sendiri.
3. Bagaimanakah sanksi administratif terhadap penyalahgunaan izin operasional rumah sakit

Setelah dilakukan penelitian maka diketahui :

1. Aspek hukum ditemukan dalam hal pemberian izin praktek kepada penyelenggaraan rumah sakit adalah bahwa pada dasarnya izin yang diberikan tersebut harus disinkronkan atau dihubungkan dengan pelayanan kesehatan masyarakat dan jika ternyata dalam hal pelayanan kesehatan tersebut menyalahi izin yang diberikan maka izin penyelenggaraan rumah sakit dapat dimintakan pertanggung-jawabannya.
2. Peranan undang-undang No. 23 Tahun 1992 sebagai ketentuan umum tentang kesehatan dalam pelaksanaan pemberian izin penyelenggaraan rumah sakit adalah sebagai patokan kepada rumah sakit dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat

3. Bahwa Aspek Hukum Administratif Negera mengatur tentang izin penyelenggaraan rumah sakit yang melaksanakan tugas-tugasnya sebagai suatu lembaga pelayanan kesehatan telah diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga penyimpangan-penyimpangan surat izin penyelenggaraan rumah sakit dapat dihindari.
4. Bahwa tugas/fungsi yang dilaksanakan oleh sebuah rumah sakit untuk melayani pasiennya untuk berobat telah dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang dan peraturan-pefaksanaannya, namun dalam hal-hal yang tertentu sebuah rumah sakit dapat saja melakukan kelalaian yang tidak diinginkannya, maka oleh karena itu masih diperlukan pembinaan dan pengawasan yang lebih baik lagi, sehingga apa yang menjadi tujuan pembangunan kesehatan itu dapat tercapai dengan baik.

